

LITERATURE REVIEW: ANALISIS PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH

Fahrizka Danindra
Universitas Sebelas Maret

Jalan Ir. Sutami 36 Kentingan, Jebres, Surakarta
Korespondensi penulis: fhrikadanindra10@student.uns.ac.id

Abstract *The Regional Government Financial Report (LKPD) serves as an important source of information to support decision-making related to fiscal policy at the regional level. In order to meet these objectives, financial reports must be of high quality by meeting key characteristics such as relevance, reliability, ease of understanding, and comparability. One of the key elements that influences the quality of this report is the effectiveness of the internal control system. The system is designed to ensure efficient, transparent, and accountable regional financial management. In this case, the main responsibility for internal control lies with the minister or regional head who leads the government organization. This study aims to explore the relationship between the internal control system and the quality of regional government financial reports. With a literature study approach, data were obtained from various references, including previous research results, academic books, journal articles, and other official documents. The results of the literature analysis indicate that the existence of a good internal control system contributes significantly to improving the quality of financial reports. A system that is optimally designed and implemented can help reduce the risk of errors, increase transparency in financial management, and support the realization of accountable financial governance. Furthermore, strengthening the internal control system is also an important foundation for encouraging public trust in regional financial management.*

Keywords: *Internal Control System, Financial Report Quality, Local Government.*

Abstrak. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berfungsi sebagai sumber informasi penting untuk mendukung pengambilan keputusan terkait kebijakan fiskal di tingkat daerah. Agar dapat memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan harus memiliki kualitas yang tinggi dengan memenuhi karakteristik utama seperti relevansi, keandalan, kemudahan dipahami, serta kemampuan untuk dibandingkan. Salah satu elemen kunci yang memengaruhi kualitas laporan ini adalah efektivitas sistem pengendalian internal. Sistem tersebut dirancang untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam hal ini, tanggung jawab utama atas pengendalian internal berada pada menteri atau kepala daerah yang memimpin organisasi pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara sistem pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan pendekatan studi literatur, data diperoleh dari berbagai referensi, termasuk hasil penelitian sebelumnya, buku akademik, artikel jurnal, dan dokumen resmi lainnya. Hasil dari analisis literatur menunjukkan bahwa keberadaan sistem pengendalian internal yang baik memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Sistem yang dirancang dan diterapkan dengan optimal dapat membantu mengurangi risiko kesalahan, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan, serta mendukung terwujudnya tata kelola keuangan yang akuntabel. Lebih jauh lagi, penguatan sistem pengendalian internal juga menjadi landasan penting untuk mendorong kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Kata kunci: Sistem Pengendalian Internal, Kualitas Laporan Keuangan, Pemerintah Daerah.

LATAR BELAKANG

Dengan berkembangnya Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, kebutuhan akan pertanggungjawaban pemerintah terhadap kinerjanya kepada masyarakat semakin menjadi prioritas. Salah satu cara utama untuk memenuhi tuntutan ini adalah melalui

penyajian laporan keuangan yang transparan dan akuntabel (Bale et al., 2023; Ferlia et al., 2023). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memiliki peran strategis dalam menyediakan informasi keuangan yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan di tingkat daerah, khususnya terkait kebijakan fiskal. Informasi yang disajikan dalam laporan ini tidak hanya membantu menilai dan memprediksi kondisi kesehatan keuangan pemerintah daerah, tetapi juga memberikan gambaran tentang situasi ekonomi daerah serta perubahan yang telah terjadi atau berpotensi terjadi di masa depan. Lebih dari itu, LKPD menjadi instrumen penting untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Laporan ini juga berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah telah dilakukan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Melalui penyajian laporan keuangan yang baik, pemerintah dapat menunjukkan akuntabilitasnya kepada masyarakat, memungkinkan warga untuk mengevaluasi sejauh mana pengelolaan sumber daya publik telah dilakukan dengan integritas. Sebagai media pertanggungjawaban, laporan ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan (Utami et al., 2023).

Laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi beberapa karakteristik utama, seperti relevansi, keandalan, kemudahan untuk dipahami, serta kemampuan untuk dibandingkan (Bale et al., 2023). Salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap kualitas tersebut adalah efektivitas sistem pengendalian internal. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan berjalan dengan efisien, transparan, dan sesuai prinsip akuntabilitas. Tanggung jawab atas pelaksanaan sistem pengendalian internal berada di tangan pimpinan organisasi, seperti menteri atau kepala daerah, yang harus memastikan bahwa keuangan publik dikelola secara profesional dan patuh terhadap peraturan yang berlaku (Nur et al., 2023). Oleh karena itu, penerapan sistem pengendalian internal yang kuat menjadi komponen penting dalam menciptakan laporan keuangan berkualitas tinggi.

Namun, kenyataannya masih terdapat sejumlah pemerintah daerah yang menghadapi tantangan dalam penerapan sistem pengendalian internal. Salah satu contoh yang menonjol adalah kasus yang terjadi di Kabupaten Karangasem pada tahun 2016.

Masalah yang muncul berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, yang tercermin dari kelemahan dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, ditemukan adanya kelebihan pembayaran senilai Rp37,97 juta akibat ketidaksesuaian harga material pada bukti pertanggungjawaban. Selain itu, terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp47,98 juta di lima desa. Tidak hanya itu, kelemahan lain terletak pada kurang tertibnya penyusunan dokumen-dokumen strategis, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa. Salah satu masalah utama adalah pemerintah desa tidak menetapkan RKP Desa melalui peraturan desa dan sering kali menyusun RKP Desa setelah APB Desa telah dibuat.

Permasalahan ini menekankan pentingnya reformasi dan penguatan sistem pengendalian internal untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana sistem pengendalian internal dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan menggunakan pendekatan kajian literatur, penelitian ini mengulas berbagai temuan empiris dan teori yang relevan untuk memberikan wawasan mendalam mengenai peran sistem pengendalian internal dalam mendukung kualitas keuangan pemerintah. Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang perlu diambil untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah secara keseluruhan, termasuk penerapan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi untuk mendukung proses pengelolaan keuangan yang lebih efektif.

KAJIAN TEORITIS

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan merupakan dokumen terstruktur yang memuat informasi mengenai posisi keuangan serta transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, laporan keuangan berfungsi sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam satu periode tertentu. Laporan keuangan yang berkualitas mencerminkan bahwa kepala daerah telah melaksanakan tugas dan

tanggung jawabnya sesuai dengan wewenang yang diberikan, terutama dalam memastikan pengelolaan organisasi berjalan secara transparan dan akuntabel. Dalam lingkup pemerintahan daerah, laporan keuangan juga menjadi alat untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) (Utami et al., 2023).

Sebagai produk utama dari proses akuntansi, laporan keuangan melibatkan sejumlah tahapan penting, mulai dari pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, hingga analisis data keuangan suatu entitas. Proses pencatatan dan penggolongan dilakukan secara rutin setiap kali terjadi transaksi keuangan, sedangkan pelaporan dan analisis biasanya dilakukan secara periodik sesuai kebutuhan organisasi. Salah satu tujuan utama dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah menyediakan informasi keuangan yang relevan dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan di tingkat daerah, seperti kepala daerah dan DPRD, untuk mendukung pengambilan keputusan fiskal (Lestari & Dewi, 2020).

Sebagai alat informasi, laporan keuangan berperan dalam mengevaluasi dan memprediksi kondisi kesehatan keuangan pemerintah, memantau kinerja ekonomi, serta mengidentifikasi perubahan yang telah atau mungkin terjadi. Selain itu, laporan keuangan juga digunakan untuk menilai kesesuaian pengelolaan keuangan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan memiliki karakteristik kualitatif seperti relevansi, keandalan, kemudahan dipahami, dan kemampuan untuk dibandingkan, laporan keuangan dapat memberikan nilai informasi yang berguna dalam mendukung proses pengambilan keputusan strategis. Hal ini menjadikan laporan keuangan sebagai elemen krusial dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dan bertanggung jawab (Lestari & Dewi, 2020).

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan serangkaian rencana yang mencakup struktur organisasi, metode, dan prosedur yang dirancang untuk melindungi aset perusahaan, memeriksa akurasi data akuntansi, meningkatkan efisiensi, serta memastikan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen (Ferlia et al., 2023). Dalam praktiknya, pengendalian internal mencakup berbagai elemen yang saling terkoordinasi, termasuk struktur

organisasi, teknik pengawasan, dan langkah-langkah verifikasi untuk memastikan data akuntansi yang andal dan aman, sekaligus mendorong efisiensi dan kepatuhan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Berdasarkan tujuan utamanya, pengendalian internal terbagi menjadi dua jenis, yaitu pengendalian internal akuntansi dan pengendalian internal administratif. Pengendalian internal akuntansi berfokus pada pengamanan aset organisasi serta verifikasi ketelitian dan keandalan data akuntansi, sedangkan pengendalian internal administratif lebih berorientasi pada peningkatan efisiensi dan mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajemen (Nur et al., 2023).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sistem pengendalian internal pemerintah merupakan bagian integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai organisasi. Sistem ini bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap tercapainya tujuan organisasi melalui operasional yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang andal, pengamanan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pengendalian internal tidak hanya menjadi alat untuk memastikan stabilitas organisasi, tetapi juga untuk mendukung tata kelola yang baik, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap proses yang dilakukan (Lestari & Dewi, 2020).

METODE PENELITIAN

Permasalahan ini menunjukkan urgensi untuk memperbaiki sistem pengendalian internal agar tercipta pengelolaan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan selaras dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Sistem pengendalian internal yang efektif menjadi suatu hal penting dalam mendorong tata kelola keuangan yang dapat dipercaya oleh berbagai pihak, termasuk masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana sistem pengendalian internal berkontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Melalui pendekatan kajian literatur, penelitian ini akan mengkaji berbagai temuan dari penelitian terdahulu serta studi empiris yang relevan untuk memahami bagaimana sistem pengendalian internal memengaruhi kualitas laporan keuangan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pentingnya penguatan sistem pengendalian internal sebagai bagian integral dari reformasi tata kelola keuangan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel. 1 Daftar artikel yang digunakan dalam *literature review*

	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1.	(Lestari & Dewi, 2020)	“Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”	“Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kualitas laporan keuangan”
2.	(Rohmah et al., 2020)	“Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang”	“Berdasarkan hasil uji parsial pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, dan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan”
3.	(Wulandari & Octaviani, 2020)	“Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan	“Hasil pengujian analisis menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi, standar akuntansi pemerintahan, dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan”

		(Studi Empiris Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogori)”	
4.	(Rahayu & Kanita, 2023)	“Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022)”	“Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial variabel penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada OPD Provinsi DKI Jakarta. Secara parsial sistem pengendalian intern memiliki pengaruh signifikan dengan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada OPD di Provinsi DKI Jakarta”
5.	(Utami et al., 2023)	“Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo”	“Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas sumber daya manusia, dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bungo. Serta secara simultan penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas sumber daya manusia, dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bungo”

6.	(Andina et al., 2023)	“Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”	“Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan”
7.	(Nur et al., 2023)	“Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Sistem Informasi Akuntansi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan”	“Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pemahaman akuntansi serta pemanfaatan SIA tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan sistem pengendalian internal secara parsial mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Serta secara simultan pemahaman akuntansi, pemanfaatan SIA, serta Sistem pengendalian internal memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan”
8.	(Yunitasari et al., 2024)	“Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada BPKAD Provinsi Jawa Tengah”	“Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan di Provinsi Jawa Tengah. Serta secara simultan pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan di Provinsi Jawa Tengah di BPKAD Provinsi Jawa Tengah”

9.	(Bale et al., 2023)	“Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Kupang)”	“Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Kupang. Sedangkan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Kupang. Serta secara simultan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Kupang”
10.	(Simanjuntak et al., 2023)	“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kota Medan”	“Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel kompetensi sumber daya manusia dan pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan kota Medan. Serta secara simultan kompetensi sumber daya manusia dan pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan kota Medan”
11.	(Melta et al., 2023)	“Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada Dinas Komunikasi Informatika Dan	“Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel akuntansi berbasis akrual dan pengendalian intern berpengaruh pada kualitas laporan keuangan Dinas Komunikasi dan Statistik Provinsi Lampung. Serta secara parsial variabel akuntansi berbasis akrual dan pengendalian intern berpengaruh pada kualitas laporan keuangan di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung”

		Statistik Provinsi Lampung”	
12.	(Widiastuti et al., 2023)	“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung”	“Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi SDM memengaruhi kualitas pelaporan pada keuangan pemerintah secara positif serta signifikan. Dan sistem pengendalian Intern memengaruhi kualitas pelaporan pada keuangan pemerintah secara positif dan signifikan. Serta variabel penggunaan TI memengaruhi kualitas pelaporan pada keuangan secara positif serta signifikan”
13.	(Ferlia et al., 2023)	“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada BKAD Kabupaten Malang)”	“Hasil ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel akuntabilitas dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Serta secara parsial variabel integritas tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah”
14.	(Maharti ni et al., 2021)	“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada	“Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan secara parsial sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan”

		Pemerintah Kabupaten Karangasem”	
--	--	----------------------------------	--

Sistem pengendalian internal merupakan proses yang bertujuan untuk mengelola, mengawasi, dan menilai penggunaan sumber daya organisasi sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan yang telah ditentukan (Lestari & Dewi, 2020). Berdasarkan PP No. 66 Tahun 2008, sistem ini mencakup serangkaian tindakan dan aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan staf organisasi untuk memastikan pencapaian tujuan dengan cara yang efektif, efisien, dan patuh terhadap peraturan yang berlaku. Sementara itu, kualitas laporan keuangan diukur melalui karakteristik utamanya, yaitu relevansi, keandalan, kemudahan untuk dipahami, dan kemampuan untuk dibandingkan (Bale et al., 2023).

Kajian dari 14 artikel menunjukkan adanya kaitan antara penerapan sistem pengendalian internal dan peningkatan kualitas laporan keuangan. Sebagai contoh, penelitian Lestari & Dewi (2020) di Kabupaten Badung menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal yang optimal dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sistem ini memiliki kemampuan untuk meminimalkan potensi penyimpangan dan kebocoran dalam pelaporan keuangan (Wulandari & Octaviani, 2020). Semakin efektif sistem pengendalian internal dalam organisasi, semakin besar kemungkinan tujuan organisasi tercapai, informasi yang dihasilkan lebih andal, dan laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas tinggi. Pengendalian internal juga berperan dalam menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan memastikan konsistensi, sehingga dapat mengurangi risiko kesalahan serta potensi kecurangan dalam proses penyusunan laporan keuangan (Bale et al., 2023).

Namun, meskipun sistem pengendalian internal memiliki peran signifikan dalam mendukung pengelolaan keuangan yang baik, tidak berarti bahwa penerapannya selalu menjamin laporan keuangan yang berkualitas tinggi. Beberapa penelitian di pemerintah daerah menunjukkan bahwa meskipun pengendalian internal telah diterapkan dengan baik, dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan terkadang tidak signifikan. Penelitian oleh Andina et al., (2023) dan Mahartini et al., (2021) mengindikasikan bahwa efektivitas sistem pengendalian internal saja tidak cukup untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Mahartini et al., (2021) menemukan bahwa

penerapan sistem informasi akuntansi yang lengkap belum mampu sepenuhnya mengurangi pelanggaran terhadap prosedur akuntansi atau mendeteksi kesalahan yang terjadi. Selain itu, kelemahan dalam sistem pengendalian internal sering kali mempersulit pendeteksian kecurangan dalam proses akuntansi (Rahayu & Kanita, 2023).

Fakta ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan tidak hanya bergantung pada efektivitas sistem pengendalian internal. Faktor lain, seperti kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan informasi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, juga memainkan peran yang sangat penting (Mahartini et al., 2021). Oleh karena itu, untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh elemen dalam sistem akuntansi, termasuk penerapan standar yang berlaku dan kepatuhan terhadap regulasi, diterapkan secara konsisten dan menyeluruh.

Dengan demikian, meskipun sistem pengendalian internal adalah komponen penting dalam pengelolaan keuangan, kualitas laporan keuangan yang optimal hanya dapat dicapai jika seluruh aspek tata kelola keuangan, termasuk standar akuntansi, prinsip transparansi, dan kepatuhan regulasi, diterapkan secara harmonis. Hal ini mencerminkan pentingnya pendekatan holistik dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sistem pengendalian internal berperan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan meminimalkan risiko kesalahan, kecurangan, dan penyimpangan. Namun, efektivitasnya tidak sepenuhnya menjamin laporan keuangan yang berkualitas tinggi, karena kualitas tersebut juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan pada peraturan. Oleh karena itu, selain memastikan sistem pengendalian internal berjalan optimal, pemerintah daerah perlu memperkuat penerapan standar akuntansi dan kepatuhan terhadap regulasi untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal, relevan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi.

DAFTAR REFERENSI

- Andina, N., Nurlaila, & Nurwani. (2023). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Journal of Management and Business*, 5, 627–641.
- Bale, P. J., Marlina, T., & Muanas, M. (2023). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Kupang). *Jurnal Informatika Kesatuan*, 3(2), 111–122. <https://doi.org/10.37641/jikes.v3i2.1815>
- Ferlia, T. M., Setyowati, S. W., Retnasari, A., & Irianto, M. F. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada BKAD Kabupaten Malang). *Jurnal Akuntansi Neraca*, 1(2), 45–56. <https://doi.org/10.59837/jan.v1i2.9>
- Lestari, N. L. W. T., & Dewi, N. N. S. R. T. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2), 170–178. <https://doi.org/10.22225/kr.11.2.1435.170-178>
- Mahartini, N. K. A., Yuesti, A., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Karangasem. *JURNAL KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(4), 1125–1134.
- Melta, S. S., Silvia, D., & Putri, A. E. (2023). Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruar, Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 20(2), 194–201. <https://doi.org/10.31849/jieb.v20i2.16202>
- Nur, M. M., Sopanah, A., & Puspitosarie, E. (2023). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Sistem Informasi Akuntansi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan*, 10, 48–58. <https://doi.org/10.53769/ijms.v2i2.667>
- Rahayu, S., & Kanita, A. D. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022). *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 423–432. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1.3093>
- Rohmah, L., Askandar, N. S., & Sari, A. F. K. (2020). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang. *E-Jra*, 9(5), 43–51. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/8286>
- Simanjuntak, Z. O. S., Rumapea, M., & Sembiring, R. (2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist*,

7(1), 65–69.

- Utami, L. R., Yudi, & Erwati, M. (2023). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 8(2), 283–302. <https://doi.org/10.30631/ijoeib.v8i2.1890>
- Widiastuti, I. A., Indraswarawati, S. A. P. A., & Putra, I. M. E. L. (2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, 65–75.
- Wulandari, D. R., & Octaviani, A. (2020). Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogori). *Journal Of Accounting and Financial*, 5(1), 1–12. <https://e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/aktual/article/view/633>
- Yunitasari, F. A., Setyowati, L., Durya, N. P. M. A., & Pamungkas, I. D. (2024). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada BPKAD Provinsi Jawa Tengah. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 10(1), 58–71. <https://doi.org/10.38204/jrak.v10i1.1715>